

KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DALAM MENGEMBANGKAN WISATA RELIGI MAKAM GUS DUR

Olivia Syafira N.Z.S

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

olivia.17041184042@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Sektor pariwisata religi saat ini sedang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang, dikarenakan hal tersebut dapat digunakan sebagai daya tarik bagi Kabupaten Jombang sebagai “Kota Santri”. Salah satu bentuk tindakannya adalah mengembangkan Wisata Religi Makam Gus Dur. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk dapat berkoordinasi menggunakan pendekatan komunikasi organisasi yang efektif dengan para pihak terkait dalam pengembangan kawasan wisata religi ini agar dapat berjalan maksimal. Adanya penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan komunikasi organisasi dengan semua pihak terkait dalam pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur, dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode penelitian studi kasus untuk meneliti fenomena pada objek penelitian tersebut secara alamiah. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa dalam komunikasi organisasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan para pihak terkait tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan koordinasi yang terjalin tidak rutin, menyeluruh, dan terpusat. Serta tidak ada motif untuk mencapai satu tujuan yang sama untuk mengembangkan wisata religi ini.

Kata kunci : Komunikasi Organisasi, Wisata Religi Kabupaten Jombang

Abstract

The religious tourism sector is currently a concern of the Jombang Regency Government, because it can be used as an attraction for Jombang Regency as a "Santri City". One form of action is to develop the Religious Tourism of Gus Dur's Tomb. For this reason, the role of local governments is needed to be able to coordinate using an effective organizational communication approach with related parties in the development of this religious tourism area so that it can run optimally. The existence of this study aims to explore information about the role of the Government of Jombang Regency in carrying out organizational communication with all relevant parties in the development of Religious Tourism of the Gus Dur's Tomb, using qualitative approaches and case study methods to examine the phenomena in the research object naturally. From the research that has been done, it shows that in organizational communication between the Jombang Regency Government, with related parties did not go well. This is due to the non-routine, comprehensive, and centralized coordination. And there is no motive to achieve the same goal to develop this religious tourism.

Keywords: Organizational Communication, Jombang Regency's Religious Tourism

PENDAHULUAN

Kabupaten Jombang dikenal dengan sebutan “Kota Santri”. Adanya branding yang kuat sebagai “Kota Santri”, membuat banyak orang baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri berminat datang ke Kabupaten Jombang untuk berwisata religi, dengan tujuan utama yaitu berziarah ke makam para ulama pendiri pesantren.

Terdapat ratusan pondok pesantren di Kabupaten Jombang. Tiga diantaranya merupakan pondok pesantren besar yang kerap kali dikunjungi para wisatawan untuk berziarah. Dikarenakan pada ketiga tempat tersebut terdapat makam para ulama pendiri pesantren yang

dituakan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat muslim di Jawa Timur.

Namun dari ketiganya yang paling sering dijadikan sebagai tujuan destinasi wisata religi oleh masyarakat adalah makam di dalam Pondok Pesantren Tebuireng (yang berlokasi di Jl. Irian Jaya No. 10, Dusun Tebuireng, Desa Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang). Yang mana di dalam kompleks makam keluarga tersebut terdapat makam 3 tokoh besar sekaligus, yaitu KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim, dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Seluruh tokoh tersebut merupakan tokoh-tokoh besar Nahdhatul Ulama (yang selanjutnya

disingkat dengan NU). Utamanya KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan tokoh pendiri NU. Selain itu, anak dan cucunya, yaitu KH. Wahid Hasyim dan KH. Abdurrahman Wahid juga dimakamkan bersebelahan di kompleks pemakaman keluarga yang sama dengan beliau, dimana mereka juga merupakan tokoh besar NU dan ketiganya telah diresmikan pula sebagai pahlawan nasional.

KH. Wahid Hasyim adalah Menteri Agama di era Presiden Soekarno yang menjabat selama 3 periode, beliau juga sekaligus menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) pada tahun 1951, sedangkan KH. Abdurrahman Wahid adalah presiden ke-4 Republik Indonesia, serta menjadi salah satu tokoh yang berjasa terhadap NU dengan merubah *image* NU sebagai organisasi islam yang disegani baik secara nasional maupun di tingkat internasional yaitu dengan mengembalikan NU ke *khittah* melalui Musyawarah Nasional (Musnas) dan Muktamar NU yang berlokasi di Kabupaten Situbondo pada tahun 1926.

Jasa lainnya terhadap NU ialah, beliau telah berhasil menjadikan NU sebagai kekuatan politik dan sosial yang patut diperhitungkan oleh berbagai pihak utamanya oleh pemerintah Republik Indonesia melalui gerakan "*Civil Society*" (Liputan6, 2016).

Gus Dur juga mendapat julukan sebagai "Bapak Pluralisme" atau tokoh multietnis, dikarenakan jasa beliau yang begitu besar terhadap pengakuan serta mempersatu berbagai agama, ras, serta etnis di Indonesia. Julukan tersebut dinilai sesuai dengan tindakan-tindakan beliau yang senantiasa melakukan pembelaan terhadap kaum minoritas.

Salah satu aksinya yaitu memusnahkan diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa dengan cara mencabut aturan yang selama ini berlaku untuk melarang diadakannya kegiatan adat masyarakat Tionghoa secara terbuka, misalnya perayaan tahun baru China atau yang disebut juga dengan perayaan *imlek*.

Aturan yang dicabut oleh Gus Dur tersebut ialah Intruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967 mengenai agama, kepercayaan, serta adat istiadat China, yang mana aturan yang tidak memperbolehkan segala sesuatu mengenai kegiatan kaum Tionghoa ini dibuat dan diberlakukan saat orde baru yaitu pada masa kepemimpinan presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto. Namun pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Gus Dur kemudian

mengganti aturan lama tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 6 tahun 2000 yang mengizinkan warga Tionghoa dengan bebas mengadakan perayaan tahun baru China sejak saat itu.

Hal inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang merasa kehilangan atas kepergian Gus Dur pada tanggal 30 Desember tahun 2009 lalu, dan membuat tidak hanya umat muslim yang berziarah ke makam beliau, melainkan masyarakat dari berbagai agama, ras dan etnis di Indonesia hingga yang datang dari berbagai negara lain berkeinginan datang untuk sekedar berdo'a di tempat ini. Oleh karena itu, peziarah di tempat ini lebih banyak dibanding dengan beberapa makam ulama lainnya di Kabupaten Jombang.

Atas antusiasme pengunjung yang begitu besar untuk berziarah di tempat ini, terlebih sejak Gus Dur dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di dalam Pondok Pesantren Tebuireng, sehingga pemerintah daerah kemudian meresmikannya sebagai Wisata Religi Makam Gus Dur. Berdasarkan informasi yang didapat penulis saat mewawancarai pihak dari DISPORAPAR Kabupaten Jombang, wisata religi yang setiap harinya dikunjungi kurang lebih 2000 pengunjung di hari biasa dan lebih dari 5000 pengunjung di akhir pekan ini diresmikan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai wisata religi sejak tahun 2011 lalu.

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, melainkan pemerintah daerah menilai objek wisata religi ini memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik baru dalam sektor pariwisata khususnya pariwisata religi di Kabupaten Jombang. Dan daya tarik inilah yang coba di pertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dengan memperhatikan pengembangan pada Wisata Religi Makam Gus Dur.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu latar belakang kuat yang dapat menjadi sebuah magnet tersendiri bagi para pengunjung untuk dapat tertarik berwisata ke tempat ini adalah karena di dalam kompleks makam tersebut terdapat tidak hanya satu melainkan ada beberapa makam tokoh besar NU.

Yang mana, NU adalah organisasi islam terbesar tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan NU juga menjadi organisasi islam terbesar di Indonesia. Diperkuat lagi dengan adanya tradisi ziarah yang hanya dilakukan oleh umat muslim yang menjadi anggota organisasi islam tersebut dengan jumlah masa yang besar yang datang dari

berbagai daerah di Indonesia. Sehingga Wisata Religi Makam Gus Dur dapat menyerap banyak pengunjung setiap harinya.

Selain itu, Makam-makam tersebut terletak di dalam Pondok Pesantren Tebuireng yang mana pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Kabupaten Jombang, sekaligus menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia yang namanya dikenal hingga ke mancanegara karena telah menghasilkan berbagai tokoh penting di Indonesia seperti KH. Shalahudin Wahid (Gus Sholah), KH. Ahmad Siddiq, bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, KH. Ma'ruf Amin, juga tercatat pernah belajar di Pondok Pesantren Tebuireng selama kurang lebih 6 tahun untuk mempelajari kitab fiqh dan ilmu agama.

Mengutip dari situs (Liputan6, 2011), suatu hal yang membuat Pondok Pesantren Tebuireng menjadi sebuah pondok pesantren istimewa jika dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren lainnya di Kabupaten Jombang ialah adanya fakta bahwa KH. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh kyai utama di daerah Pulau Jawa pada era 1920, yang menjadi guru bagi semua kyai besar dari berbagai wilayah di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa titik pertemuan antar kaum muslim di Nusantara berada pada beliau.

Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pondok Pesantren Tebuireng beserta tokoh penting yang dimakamkan di dalamnya sangat dihormati dan diistimewakan oleh masyarakat. Hingga berkunjung ke Wisata Religi Makam Gus Dur sering kali menjadi satu paket dalam perjalanan umat muslim yang ingin berwisata religi mengunjungi "wali limo" ataupun "wali songo" di Pulau Jawa. Beberapa hal tersebutlah yang menjadi pembeda antara Wisata Religi Makam Gus Dur dengan berbagai wisata religi lain di Jawa Timur khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

Adanya keyakinan masyarakat bahwa do'a khusus seperti meminta kesejahteraan, kesembuhan, sampai bertujuan *ngalap barokah* (meminta berkah) akan lebih *mustajabah* (manjur) jika dipanjatkan di kawasan makam ini, juga menjadi salah satu alasan yang membuat tempat wisata religi ini tidak pernah sepi pengunjung (Mulyani, 2017).

Bukti bahwa pengunjung di wisata religi ini tidak pernah sepi dapat kita lihat pada tabel berikut yang memuat data pengunjung Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Jombang, yang tercatat dari tahun 2011 hingga tahun 2015 oleh (DISPORAPAR Kabupaten Jombang, n.d.) dan diunggah melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang www.jombangkab.bps.go.id. Pada tabel di bawah ini menunjukkan data bahwa pengunjung yang datang ke Wisata Religi Makam Gus Dur selalu meningkat setiap tahunnya sejak awal diresmikan.

Tabel 1.1 Pengunjung Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Jombang Tahun 2011-2015

| Nama Objek Wisata | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sumber Boto | 42.233 | 38.079 | 41.455 | 35.994 | 15.730 |
| Tirta Wisata | 49.040 | 33.635 | 25.540 | 25.673 | 10.611 |
| Candi Arimbi | 2.319 | 6.700 | 5.091 | 5.646 | 1.027 |
| Sendang Made | 5.008 | 6.158 | 3.987 | 4.896 | 1.920 |
| Prasasti Gurit | 124 | 217 | 262 | 213 | 122 |
| Makam Sayyid Sulaiman | 95.674 | 339.086 | 323.083 | 143.169 | 108.862 |
| Situs Kudu | 192 | 403 | 471 | - | - |
| Makam Gus Dur | 771.104 | 982.649 | 1.088.070 | 1.185.742 | 1.235.746 |
| Jumlah | 965.694 | 1.406.927 | 1.487.969 | 1.401.333 | 1.374.018 |

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang

Pada tingkatan provinsi, wisata religi ini terletak di posisi ke- 5 pada urutan 6 wisata religi dengan jumlah pengunjung terbanyak tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur menurut informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Walaupun Wisata Religi Makam Gus Dur merupakan wisata religi terbaru jika dibandingkan dengan wisata religi yang lain di wilayah Jawa Timur, akan tetapi wisata religi ini sanggup bersanding dengan berbagai wisata religi lainnya yang sudah ada sejak lama di daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada catatan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang dipublikasikan pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bps.go.id> sebagai berikut :

Tabel 1.2 Urutan Wisata Religi Dengan Jumlah Pengunjung Terbanyak di Jawa Timur Tahun 2018

| No. | Daya Tarik Wisata | Jumlah Pengunjung Tahun 2018 | Persentase Dari Total Pengunjung 50 Wisata Religi |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Makam Sunan Bonang | 2.120.331 | 15,2% |
| 2. | Makam Ibrahim Asmoro | 2.050.46 | 14,7% |
| 3. | Kawasan Wisata Religi Ampel | 1.412.749 | 10,1% |
| 4. | Makam Sunan Giri | 1.325.427 | 9,5% |
| 5. | Makam Gus Dur | 1.149.299 | 8,2% |
| 6. | Makam M.M Ibrahim | 1.108.840 | 8% |
| Jumlah | | 9.167.112 | 100% |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Berdasarkan (Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 29 Th. 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, n.d.), terdapat penjelasan bahwa adanya kontribusi dari sektor pariwisata akan menjadikan sektor tersebut dapat memiliki posisi strategis pada berbagai kebijakan pembangunan, terlebih bagi Republik Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan yang begitu banyak dan beragam dapat digunakan, diperkuat serta diberdayakan untuk beragam kebijakan yang dapat memajukan negara Republik Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, adanya pembangunan pariwisata juga dapat berpotensi meningkatkan perekonomian Republik Indonesia.

Dampak lain yang akan timbul akibat adanya pembangunan pariwisata menurut (Yomi, Wanda G, Adnan, M Fahri & Alhadi, 2018) antara lain, terdapat berbagai manfaat baik dari segi ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan, ilmu pengetahuan, serta adanya peluang dan juga kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Semua itu dapat terwujud tentunya jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik. Sebab berdasarkan pendapat dari (Mohammad, 2012), dengan dikembangkannya sektor pariwisata dengan baik dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung pada sebuah objek wisata. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Jombang pun melakukan hal yang serupa pada salah satu destinasi yang sedang dikembangkannya yaitu Wisata Religi Makam Gus Dur.

Sejumlah pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah pada wisata religi tersebut antara lain, perbaikan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur, dan penambahan objek wisata, seperti Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari (MINHA), Tugu At'Tauhid, pusat oleh-oleh, juga terdapat pula sebuah terminal khusus untuk pengunjung wisata religi yang berfungsi sebagai parkir bagi pengunjung wisata dan selanjutnya disebut dengan Terminal KMGD (Kawasan Makam Gus Dur).

Berdasarkan keterangan dari mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf yang dikutip penulis dari situs (Inilah, 2010), untuk mengembangkan wisata religi ini dibutuhkan setidaknya dana sebesar 180 miliar rupiah. Yang mana dana tersebut berasal dari gabungan dana APBD Kabupaten Jombang, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN. Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Jombang sejumlah 10 miliar rupiah diperlukan untuk membebaskan lahan yang digunakan sebagai toilet umum, parkir pengunjung yang telah disebutkan sebelumnya yaitu KMGD, serta untuk membangun stand-stand berjumlah kurang lebih 100 unit yang saat ini digunakan para pelaku UMKM untuk menjual berbagai macam oleh-oleh.

Selanjutnya, terdapat dana dari APBD Provinsi Jawa Timur sejumlah 30 miliar rupiah dan APBN sejumlah 140 miliar rupiah, yang masing-masing diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sarana bagi pengunjung yang ingin berjalan kaki sepanjang dari parkir atau terminal KMGD menuju lokasi kompleks makam Gus Dur, serta dana APBD tersebut dibutuhkan untuk proyek pelebaran akses jalan raya dari Diwek hingga ke daerah lokasi wisata religi yaitu Dusun Tebuireng, guna memudahkan akses jalan para wisatawan yang berkunjung menggunakan kendaraan besar.

Agar upaya pengembangan mencapai keberhasilan, pemerintah berperan besar dalam berkoordinasi dengan para pihak terkait pengembangan kawasan wisata religi, yaitu dengan melakukan pendekatan komunikasi organisasi yang efektif antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan pihak-pihak lain yang terlibat, diantaranya yaitu pihak dari Pondok Pesantren Tebuireng (Yayasan Hasyim Asy'ari), Desa Cukir (Pemerintah Desa Cukir), Desa Kwaron (Pemerintah Desa Kwaron), serta dengan pihak Pemerintah Kabupaten Jombang itu sendiri melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) yang telah menyerahkan wewenangnya kepada UPT Pengelolaan Kawasan

Wisata Religi Kabupaten Jombang untuk turut andil dalam upaya pengembangan pada kawasan wisata religi ini (Wulandari, 2019).

Komunikasi organisasi yang terjalin antar pihak, akan berdampak pada keberhasilan pengembangan kawasan wisata religi. Oleh karena itu, melakukan komunikasi organisasi yang efektif antar pihak dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam sebuah organisasi. Dimana masing-masing pihak dapat turut berperan aktif dalam upaya pengembangan pariwisata religi sesuai dengan tugasnya. Tanpa adanya komunikasi organisasi yang berjalan dengan baik, maka upaya pengembangan tersebut tidak dapat berjalan maksimal.

Namun dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai permasalahan yang belum diselesaikan oleh para pihak yang terlibat selama proses pengembangan. Antara lain pembangunan objek wisata yang mangkrak karena ketidakjelasan dalam pengelolaan oleh pihak yang bersangkutan, adanya miskomunikasi antar pihak pengelola, dan berbagai permasalahan lainnya.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai fenomena ini. Dan dalam hal ini peneliti telah menentukan fokus penelitian yaitu mengenai bagaimana komunikasi organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang dengan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode penelitian studi kasus (*case study research*) yang bertujuan agar dapat meneliti kondisi objek penelitian secara alamiah dan mendalam. Sumber data sekunder diperoleh peneliti berupa beberapa arsip seperti surat undangan dan surat izin yang berhubungan dengan koordinasi antar pihak pengelola, serta notulensi hasil rapat koordinasi antar pihak pengelola Wisata Religi Makam Gus Dur. Sedangkan sumber data primer diperoleh peneliti dengan cara melakukan observasi di lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi.

Kegiatan wawancara ditujukan kepada beberapa pihak yang dipilih peneliti sebagai informan atau narasumber, antara lain :

1. Pihak dari DISPORAPAR Kabupaten Jombang (diwakili oleh sekretaris

DISPORAPAR Kabupaten Jombang)

2. Pengurus Yayasan Hasyim Asy'ari dari Pondok Pesantren Tebuireng (diwakili oleh sekretaris Yayasan Hasyim Asy'ari)
3. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Kabupaten Jombang
4. Kepala Desa Cukir
5. Kepala Desa Kwaron.

Serta terdapat pula narasumber tambahan yang terdiri dari para pelaku UMKM di sekitar kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur, yang mana mereka diwakili oleh masing-masing ketua paguyuban dari 3 jenis UMKM yang berbeda, Danru (Komandan Regu) dari UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Kabupaten Jombang, serta petugas keamanan dari Pondok Pesantren Tebuireng.

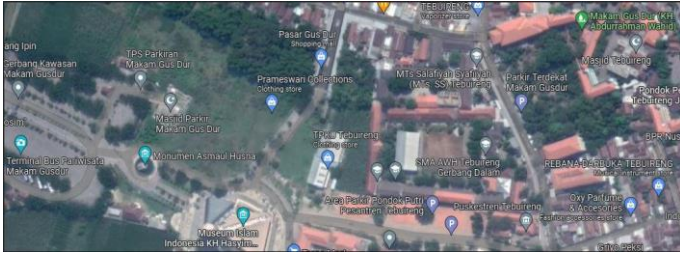
Dalam wawancara tersebut sejumlah pertanyaan yang diberikan peneliti yaitu mengenai bagaimana alur koordinasi yang terjalin tidak hanya antar pihak pengelola melainkan juga dengan masyarakat di sekitar kawasan wisata terkait upaya pengembangan tersebut, apa saja peran masing-masing pihak, serta permasalahan apa yang terjadi selama proses pengembangan wisata berlangsung.

Hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu data *reduction* (reduksi data), kemudian data *display* (penyajian data), dan terakhir *conclusion drawing* atau *verification* (menarik kesimpulan). Ketiganya akan saling berkesinambungan dan terus berjalan hingga penelitian selesai.

PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di kawasan Wisata religi Makam Gus Dur yang wilayahnya terletak di antara dua desa, yakni Dusun Tebuireng yang merupakan wilayah dari Desa Cukir, serta Dusun Seblak yang menjadi wilayah Desa Kwaron, kedua wilayah tersebut berada di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

Sebelum memulai pada bagian pembahasan, berikut peneliti akan menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta lokasi Wisata Religi Makam Gus Dur hasil dari tangkapan layar dari (Google Maps) untuk menunjang keterangan maupun penjelasan-penjelasan yang akan disajikan peneliti pada bagian pembahasan ini agar lebih mudah untuk dipahami

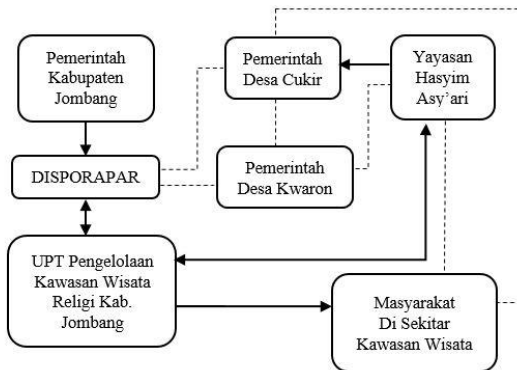


Sumber : <https://maps.google.com>

Wisata Religi Makam Gus Dur terbagi menjadi 3 wilayah pengelolaan, yakni wilayah Terminal KMGD, wilayah pusat oleh-oleh (tempat *stand-stand* UMKM berdiri) beserta jalan raya menuju pintu masuk area makam, dan wilayah kompleks makam yang berada di dalam Pondok Pesantren Tebuireng.

Sehingga baik pemerintah itu sendiri maupun pihak-pihak yang lainnya memiliki peran yang berbeda. Sebenarnya masing-masing pihak sama-sama memiliki peran penting terkait dalam upaya pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur ini. Namun peran yang seharusnya dijalankan tidak dapat berjalan dengan baik karena komunikasi organisasi yang terjadi pada masing-masing pihak mengalami kendala bahkan kebuntuan.

Gambaran mengenai peran beserta komunikasi yang terjadi antar pihak, akan dijelaskan peneliti dalam bentuk bagan dibawah ini.



Gambar Bagan Arus Komunikasi Antar Pihak Pengelola Wisata Religi Makam Gus Dur

Keterangan :

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DISPORAPAR memberikan wewenangya kepada UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Kabupaten Jombang yaitu untuk mengelola wilayah Terminal KMGD dan tetap berkoordinasi dengan DISPORAPAR dengan membuat laporan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.

Pemerintah Desa Cukir dan Pemerintah Desa Kwaron memiliki peran untuk saling berkoordinasi mengelola *stan-stand* UMKM yang ada di pusat oleh-oleh, dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi disepanjang jalan raya menuju pintu masuk wisata religi dikarenakan jalan tersebut merupakan perbatasan dua wilayah desa sehingga keduanya sama-sama memiliki wewenang.

Sedangkan pihak yayasan Pondok Pesantren Tebuireng yaitu Yayasan Hasyim Asy'ari berperan mengelola segala sesuatu yang ada dalam Pondok Pesantren Tebuireng, termasuk kawasan makam yang dijadikan wisata religi. Namun, yayasan pondok juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Cukir terkait penertiban para pedagang dan parkir liar kendaraan peziarah, karena mereka menggunakan sepanjang jalan raya di depan pondok pesantren yang selalu menyebabkan kemacetan.

Namun, peneliti menganalisa terdapat hal-hal yang membuat komunikasi antar pihak mengalami kendala seperti yang tergambar pada bagan dengan garis putus-putus. Bahwa seharusnya terdapat koordinasi diantara pihak-pihak berikut ini.

Yang pertama, DISPORAPAR dengan Pemerintah Desa Cukir dan juga Desa Kwaron terkait pengelolaan *stand* UMKM. Dikarena tidak ada koordinasi antar ketiga pihak tersebut, mengakibatkan 100 *stand* yang pada awalnya dibangun oleh pemerintah pusat dengan rencana pembagian 40 *stand* akan dikelola Desa Cukir, 40 *stand* dikelola Desa Kwaron, dan sisanya dapat dimiliki masyarakat, faktanya *stand-stand* tersebut mangkrak karena hingga saat ini tidak ada proses serah terima yang jelas.

Kedua, Pemerintah Desa Cukir dengan Pemerintah Desa Kwaron. Penting bagi keduanya untuk berkoordinasi karena seperti yang telah disebutkan pada latar belakang, Wisata Religi Makam Gus Dur berlokasi diantara dua desa. Akibat dari tidak adanya koordinasi antar dua desa tersebut, terdapat miskomunikasi mengenai batas wilayah masing-masing desa yang mana berpengaruh terhadap pengelolaan kawasan di sekitar Wisata Religi Makam Gus Dur.

Ada beberapa titik yang menimbulkan kebingungan, seperti batas wilayah desa pada Terminal KMGD yang menyebabkan pada akhirnya kedua pemerintah desa tidak berani ikut dalam koordinasi dengan UPT terkait objek-objek yang mangkrak, juga batas wilayah desa pada jalan yang digunakan peziarah menuju makam yang

tidak jelas menyebabkan miskomunikasi mengenai siapa yang harus mengatasi permasalahan jika terjadi banjir pada sungai di samping jalanan tersebut akibat tidak adanya yang mengelola sampah hasil dari para pedagang liar yang tidak kebagian *stand* diatas sungai.

Ketiga, Yayasan Hasyim Asy'ari dengan Pemerintah Desa Kwaron, Pemerintah Desa Cukir sekaligus dengan masyarakat di sekitar kawasan wisata religi terkait penertiban para pedagang dan parkir liar yang berada di sepanjang jalan baik di depan pintu masuk pondok bagian depan (untuk para santri, walisantri, dan tamu pondok) maupun di depan pintu masuk pondok bagian belakang (yang digunakan peziarah menuju kawasan makam).

Berdasarkan keterangan dari sekretaris Yayasan Hasyim Asy'ari, pihak yayasan pondok mengatakan mereka sebenarnya sudah berulang kali mengirim surat permohonan koordinasi kepada Pemerintah Desa Cukir untuk membantu menertibkan orang-orang tersebut. Namun Kepala Desa Cukir berkata,

"Kami juga sempat melakukan penertiban, waktu itu sekali, hanya saja tidak dilanjutkan karena mereka yang berdagang di sepanjang jalan dan parkir liar itu adalah warga Desa Cukir sendiri. Jadi, kami membiarkan mereka untuk mencari penghasilan".

Ini menunjukkan pemerintah Desa Cukir tidak menanggapi permintaan koordinasi yayasan pondok dengan serius.

Hal ini juga menjadi miskomunikasi antara yayasan pondok dan Pemerintah Desa Kwaron. Karena seharusnya yayasan pondok juga mengikutsertakan Pemerintah Desa Kwaron dalam koordinasi. Karena yang telah disebutkan sebelumnya, di kawasan tersebut juga terdapat wilayah Desa Kwaron, otomatis Desa Kwaron juga memiliki wewenang atas jalanan yang digunakan para pedagang dan parkir liar. Namun karena tidak ada koordinasi, maka Pemerintah Desa Kwaron pun tidak melakukan tindakan apapun.

Karena ketiga pihak tidak ada yang menertibkan, mengedukasi, ataupun memberi arahan kepada para pedagang dan parkir liar, akibatnya mereka masih ada hingga saat ini dan menempati tempat yang sama. Padahal Terminal KMGD dibangun untuk lahan parkir peziarah. Dan adanya pedagang liar menyebabkan kemacetan.

Bahkan terdapat puluhan pedagang dari luar daerah yang juga turut menjadi pedagang liar.

Dari keterangan beberapa pedagang yang diwawancarai oleh peneliti, mereka menganggap semua tempat aman, tidak ada yang menggusur, dan juga mereka merasa ditempat yang dianggap strategis tersebut mereka mendapat omset yang besar sehingga tidak ada keinginan untuk pindah tempat.

Pemerintah sendiri dalam menjalankan perannya pun belum dapat dikatakan berhasil. Karena terkait dengan pedagang dan parkir liar, mereka mengaku kepada peneliti bahwa dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa tidak ada yang melakukan penarikan retribusi untuk para pedagang, baik para pedagang resmi (yaitu pedagang yang tergabung dalam paguyuban) maupun pedagang liar. Sehingga retribusi hanya didapat dari karcis parkir kendaraan para peziarah di Terminal KMGD.

Satu hal lagi yang menjadi permasalahan adalah, beberapa objek baru yang ada di dalam kawasan Terminal KMGD (Museum MINHA, Tugu At-Tauhid, masjid, dsb.) tidak dikelola dengan baik, padahal menurut analisa peneliti hal ini seharusnya juga menjadi tanggungjawab pihak UPT sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk mengelola karena objek-objek tersebut berada didalam kawasan Terminal KMGD.

Akibatnya, meskipun beberapa objek telah diresmikan namun pembangunannya belum selesai hingga saat ini bahkan terdapat beberapa kerusakan karena tidak ada yang merawat. Seperti museum MINHA yang diresmikan Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu, hingga saat ini hanya lantai 1 yang boleh dimasuki pengunjung. Sedangkan lantai 2-5 tidak diperbolehkan dimasuki pengunjung karena belum rampung. Terdapat pembangunan masjid yang magkrak, serta Tugu At-Tauhid yang mengalami beberapa kerusakan.

Semua temuan tersebut jika dikaji menggunakan pendekatan komunikasi organisasi, maka dari 6 pendekatan komunikasi organisasi oleh Katherine Miller, yang paling relevan digunakan untuk kasus pada penelitian ini merujuk pada pendekatan sistem (*systems approaches*).

Hal itu karena objek dalam penelitian ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang saling terkait dan berpengaruh antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam mencapai tujuan bersama yaitu mengembangkan sebuah pariwisata religi, yang mana pendekatan sistem juga memandang organisasi sebagai suatu sistem yang saling mempengaruhi antar bagiannya.

Sehingga dengan adanya pandangan tersebut, pendekatan ini dapat digunakan untuk lebih memahami bagaimana sistem berjalan antara organisasi-organisasi tersebut untuk mengembangkan serta mengelola Wisata Religi Makam Gus Dur. Karena dalam mengembangkan sebuah pariwisata, pemerintah daerah seperti halnya Pemerintah Kabupaten Jombang tidak akan bisa berjalan sendiri, harus dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang juga berkaitan dengan pengembangan ini agar terjadi arus komunikasi yang baik antar pihak, sebab pada dasarnya tiap-tiap bagian saling ketergantungan.

Sesuai dengan pendapat (Katz & Kahn, 1978) yang mengatakan bahwa organisasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang kompleks, terbuka, dan membutuhkan interaksi baik antar komponennya maupun dengan lingkungan di sekitarnya, jika sebuah organisasi tersebut ingin tetap hidup dan bertahan.

Dalam (Miller, 2012) pendekatan sistem dibuatlah sebuah konsep yang mana terdapat beberapa sub pembahasan. Yaitu mengenai a) Terbentuk dari apakah sebuah sistem (komponen sistem), b) Bagaimana sistem tersebut bekerja (proses terbentuknya sistem), dan c) Mengenai apa karakteristik unik yang muncul dari adanya komponen sistem dan proses sistem tersebut (properti sistem).

Dari sejumlah temuan peneliti tersebut jika dikaitkan dengan pendekatan sistem maka terdapat :

1. Hierarkis Komunikasi Organisasi Dalam Wisata Religi Makam Gus Dur

Dalam hal ini terletak pada bagian Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DISPORAPAR membentuk UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Kabupaten Jombang untuk membantu mengawasi pengelolaan serta pengembangan pada seluruh wisata religi di Kabupaten Jombang, termasuk Wisata Religi Makam Gus Dur. Namun sebaliknya, pihak UPT juga tetap harus berkoordinasi dengan DISPORAPAR sebagai OPD yang menaunginya.

2. Problem Tidak Saling Terhubungnya Antar Sub-Sistem di Wisata Religi Makam Gus Dur

Salah satu komponen sistem adalah saling ketergantungan yang berarti bergantungnya komponen sistem satu sama lain untuk dapat berfungsi secara efektif. Namun yang terjadi adalah dalam pengelolaan Wisata Religi Makam Gus Dur antar sub-sistemnya tidak

saling terhubung secara keseluruhan dengan baik, sehingga upaya pengembangan tidak dapat berjalan maksimal. Misalnya seperti :

- a. Komunikasi organisasi yang dilakukan tidak melibatkan seluruh pihak pengelola. Hanya pihak yang merasa berkepentingan saja yang berkomunikasi. Sehingga dalam beberapa hal terjadi miskomunikasi antar pihak pengelola seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- b. Koordinasi antar pihak pengelola Wisata Religi Makam Gus Dur tidak dilakukan secara rutin atau *intens*. Sehingga koordinasi akan dilakukan hanya jika menurut pihak yang bersangkutan ada hal yang perlu dibahas saja dengan pihak lainnya. Seperti pada permasalahan Pemerintah Desa Kwaron yang tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi terkait pengelolaan maupun pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur ini.
- c. Terdapat pihak pengelola yang tidak serius dalam menanggapi koordinasi dengan pihak lainnya. Sehingga tidak terwujud kerjasama yang maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata religi. Seperti pada permasalahan permintaan koordinasi pihak yayasan pondok yang tidak ditanggapi Pemerintah Desa Cukir terkait penertiban pedagang dan parkir liar.
- d. Koordinasi antar sub-sistem tidak satu komando. Akibatnya, dalam pengelolaan dan pengembangan wisata religi ini, antara pihak Pemerintah Kabupaten Jombang dan pihak Yayasan Pondok Tebuireng berjalan sendiri-sendiri. Pada saat wawancara peneliti menanyakan keterlibatan kedua pihak dalam koordinasi satu sama lain. Namun Sekretaris Yayasan Pondok mengatakan,

"Kami tidak ada urusannya dengan Terminal KMGD dan pusat oleh-oleh, karena itu tugas pemerintah yang mengelola. Kami hanya mengatur apa yang ada di dalam pondok pesantren saja."

Begitupun sebaliknya, pihak UPT yang diwakili oleh Kepala UPT mengatakan,

"Kami hanya diberi tugas DISPORAPAR untuk menjaga, memantau, dan mengelola Terminal KMGD, karena makam berada di dalam pondok maka yang mengelola juga pihak yayasan pondok. Kami hanya koordinasi terkait jadwal buka-tutup terminal yang

menyesuaikan pondok dan perizinan peminjaman kawasan terminal untuk parkir walisantri”.

3. Permeabilitas Komunikasi Organisasi Antar Sub-Sistem Pada Wisata Religi Makam Gus Dur

Dalam mengelola dan atau mengembangkan wisata religi ini, baik pemerintah maupun yayasan pondok tidak hanya melakukan koordinasi dengan para pihak pengembang lain yang turut mengelola wisata religi ini saja, melainkan juga dengan lingkungan di sekitar kawasan wisata religi. Antara lain :

- a. Pihak UPT dalam melakukan monitoring untuk wilayah Terminal KMGD juga berkoordinasi dengan para pelaku UMKM. Dalam hal ini dengan beberapa paguyuban pedagang (antara lain Paguyuban Penjual Foto, Paguyuban Tukang Foto, dan Paguyuban Pedagang Asongan) agar kebijakan yang dibuat khususnya yang berlaku di wilayah Terminal KMGD dapat disesuaikan, dan lingkungan Terminal KMGD tetap kondusif. Salah satunya terkait aturan siapa saja pedagang yang diperbolehkan masuk Terminal KMGD. Kepada peneliti masing-masing ketua paguyuban mengatakan,

“Yang diizinkan berdagang keliling di dalam terminal hanya yang menjadi anggota paguyuban, tandanya yaitu mereka yang berdagang memakai seragam. Untuk membedakan, masing-masing paguyuban warna seragamnya berbeda. Selain itu ada aturan juga untuk jadwal kapan pedagang boleh keliling masuk terminal”.

Sehingga di dalam KMGD para pedagang tetap tertib, dan tidak ada gesekan antar pedagang yang menyebabkan ketidaknyamanan pengunjung wisata religi ini. Namun koordinasi pemerintah yang diwakili UPT ini dengan masyarakat (dalam hal ini paguyuban pedagang) hanya berhenti sampai disini, tidak ada upaya atau koordinasi dalam bentuk lain lagi untuk turut mengembangkan Wisata Religi Makam Gus Dur. Padahal, berdasarkan *analytical hierarchy process* yang dilakukan penelitian oleh (Septa Mega Hera Kartika, Herman Cahyo Diartho, 2020) bahwa prioritas pertama yang dibutuhkan untuk pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur adalah keaktifan organisasi ataupun kelompok masyarakat (39%) serta peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat sebesar (27%).

- b. Di sisi lain, terdapat Yayasan Pondok Tebuireng yang juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Cukir untuk mengatasi para pedagang dan parkir liar di sekitar kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur. Namun, dalam hal ini pihak yayasan pondok mengaku tidak pernah melakukan koordinasi sendiri dengan para pedagang dan parkir liar untuk menertibkan atau sekedar memberi peringatan, mereka menyerahkan urusan tersebut kepada Pemerintah Desa Cukir, kaitannya dengan Desa Kwaron, sekretaris yayasan pondok mengatakan tidak perlu menghubungi Pemerintah Desa Kwaron, cukup Desa Cukir saja yang menyelesaikan permasalahan ini

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam upaya pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Wisata Religi Makam Gus Dur, terdapat hierarkis antar sub-sistem, yaitu pemerintah membentuk UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Kabupaten Jombang untuk saling berkoordinasi dalam mengawasi pengelolaan dan pengembangan wisata religi di Kabupaten Jombang, termasuk Wisata Religi Makam Gus Dur.

Selain itu, ada beberapa hambatan yang membuat komunikasi organisasi antara pemerintah dengan para aktor yang terlibat tidak dapat berjalan maksimal, antara lain :

1. Tidak saling terhubungnya antar sub-sistem di wisata religi tersebut dikarenakan komunikasi organisasi yang terjadi tidak melibatkan pengelola wisata secara keseluruhan sehingga menyebabkan miskomunikasi, koordinasi antar pengelola wisata terjadi hanya pada hal tertentu sehingga tidak rutin, adanya pihak yang tidak tanggap dalam berkoordinasi dengan pihak lainnya sehingga kerjasama sulit dilakukan, serta koordinasi antar sub-sistem tidak satu komando karena masing-masing pihak merasa memiliki power.
2. Dalam hal permeabilitas, Pemerintah Kabupaten Jombang berkoordinasi dengan paguyuban pedagang terkait aturan berdagang di KMGD, sedangkan Yayasan Pondok Tebuireng berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menertibkan para pedagang dan parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

- DISPORAPAR Kabupaten Jombang. (n.d.). *Data Pengunjung Daya Tarik Wisata (DTW)*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Retrieved July 28, 2022, from <https://jombangkab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab3>
- Google Maps. (n.d.). *Google Maps*. Google Maps. <https://www.google.com/maps/@-7.6283904,112.2435072,14z>
- Inilah. (2010). *Makam Gus Dur Disulap Jadi Wisata Religi*. Inilah.com. <https://www.inilah.com/makam-gus-dur-disulap-jadi-wisata-religi>
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The Social Psychology of Organizations*. Chichester ; New York : Wiley.
- Liputan6. (2011). *Ponpes Tebuireng Lahirkan Sederet Nama Besar*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/347428/ponpes-tebuireng-lahirkan-sederet-nama-besar>
- Liputan6. (2016). *Peran Gus Dur Bangun NU dan Indonesia di Mata Kiai Jember*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/2686054/peran-gus-dur-bangun-nu-dan-indonesia-di-mata-kiai-jember>
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019.
- Miller, K. (2012). *Organizational Communication: Approaches and Processes, Sixth Edition* (M. Eckman (ed.); Sixth Edit). Lyn Uhl.
- Mohammad, R. (2012). *Perencanaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata*. Media Polonia : PT. Sofmedia.
- Mulyani, S. (2017). Kajian Terhadap Daerah Asal, Motivasi Pengunjung Dan Fasilitas Penunjang Objek Wisata Religi Makam Kh. Abdurrahman Wahid Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. *Swara Bhumi*, 4(02). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/18277>
- Septa Mega Hera Kartika, Herman Cahyo Diartho, F. W. P. (2020). Pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur di Kabupaten Jombang
- Pendekatan: Community Based Tourism. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan*, 206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.3.195-208>
- Wulandari, E. T. (2019). *Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Dalam Mengembangkan Wisata Religi Makam K.H. Abdurrahman Wahid*. 3. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/29770/27277>
- Yomi, Wanda G, Adnan, M Fahri & Alhadi, Z. (2018). Pengembangan Objek Wisata Nagari Tuo Pariangan Oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Public Sector Innovations*, Vol.3, No., 6–11.